

Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan

Windi Annesta Pratiwi¹, Diska Arliena Hafni²

^{1,2}Universitas Aisyiyah Yogyakarta

E-mail: windyanesta20@gmail.com¹, diskaarliena@unisayogya.ac.id²

Article History:

Received: 22 Juni 2023

Revised: 16 Juli 2023

Accepted: 16 Juli 2023

Keywords: PPh 21, PPh 23,
Perpajakan Rumah Sakit

***Abstract:** Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan kewajiban Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan atas pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23 dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dan perhitungan PPh pasal 21 dan pasal 23 tahun 2019-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2022 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dalam melaksanakan kewajiban atas pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23 telah dilakukan dengan cukup baik, meskipun ada beberapa hal yang masih terdapat kesalahan. Berdasarkan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21, Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan masih belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit belum menerapkan sistem penghasilan kena pajak kumulatif dalam perhitungannya. Penerapan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh rumah sakit sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Pelaporan penyeteroran dan pelaporan PPh 21 dan PPh 23 yang dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan pada tahun 2019-2022 telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan Undang-Undang yang ada.*

PENDAHULUAN

Rumah Sakit sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 berdasarkan pengelolaannya dapat dibagi menjadi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Menurut Maulana & Hafni (2021), banyaknya rumah sakit umum negeri maupun swasta yang menawarkan jasa kesehatan untuk melayani masyarakat (pasien) membuktikan bahwa

perkembangan usaha dalam bidang jasa kesehatan semakin pesat. Rumah sakit harus terus melakukan perbaikan baik dari segi medis, fasilitas, pelayanan, dan lain-lain. Rumah sakit merupakan sebuah institusi yang padat karya atau menyerap banyak tenaga kerja baik tenaga medis maupun non medis dan juga merupakan sumber penerimaan pajak terbesar di bidang industri kesehatan (Ningsih dan Hafni, 2021). Menurut Sulistyaningsih, Cahyani, Zulala, & Lestari (2020), kualitas layanan telah menjadi topik penelitian yang penting di berbagai industri, termasuk rumah sakit karena hubungannya yang signifikan dengan biaya, keuntungan, kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan jaminan layanan.

Berdasarkan penjelasan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Seseorang yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan adalah salah satu penerimaan pajak yang tergolong dalam fungsi budgetair (Rondonuwu dkk., 2017). Saat ini sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut dua sistem, yaitu *official assessment system* dan *self assessment system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak pada sistem ini bersifat pasif karena hanya menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh pemungut pajak. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak orang pribadi maupun badan diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara (Anggreni & Noviari, 2020).

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud yaitu berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Malia & Jasilah, 2016). Pajak penghasilan Pasal 23 adalah pajak dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, 2019). Dasar hukum pajak penghasilan pasal 23 yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008.

Penelitian yang dilakukan oleh Prihatono & Sutomo (2019) di Rumah Sakit Vania di Kota Bogor menyatakan bahwa Kesesuaian pelaksanaan perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai dan tenaga ahli tahun 2015-2016 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun terdapat beberapa SPT masa pembetulan di dalam laporan yang dilakukan RS vania Bogor yang disebabkan karena salah dalam menghitung jumlah karyawan, kesalahan tersebut disebabkan adanya pergantian karyawan dalam jumlah yang signifikan di bagian staff keuangan pada periode penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggreni & Noviari (2020) di Rumah sakit XYZ di Kota Denpasar, Bali. Penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban atas pajak penghasilan pasal 21 kurang baik dan tidak adanya kepatuhan. Terjadi keterlambatan pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan PPh 21 sehingga Rumah Sakit XYZ memiliki kewajiban yang harus dilunasi yaitu sanksi bunga dan denda akibat adanya keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh 21.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Hafni (2021) di Rumah Sakit X di Kota Klaten Jawa Tengah menyatakan bahwa Rumah Sakit X dalam melaksanakan kewajiban atas pajak

penghasilan pasal 21 sudah dilakukan dengan cukup baik, meskipun dalam beberapa hal masih belum sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada. Rumah sakit X selama ini melakukan penyeteroran pajak selama masa pakak berakhir dimana batas rentang waktu yang ditetapkan paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Terkait laporan pajak Rumah sakit X selalu tepat waktu. Hanya saja ketika terjadi kurang bayar hal ini seluruhnya menjadi urusan dan tanggungjawab dari masing-masing dokter sendiri dan bukan merupakan tanggungjawab dari pihak rumah sakit.

Penelitian yang dilakukan Kawindah dkk (2021) di Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna menyatakan bahwa perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna tahun 2019 belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji pegawai tidak tetap, khususnya bagi pegawai yang memiliki suami/istri PNS, sehingga menghasilkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 kurang bayar yang dalam hal ini merugikan kas Negara.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis, Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan berlokasi di Dusun Ngemplak, Kembang, Nanggulan Kulon Progo, Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan pada awalnya merupakan balai pengobatan dan rumah sakit bersalin PKU Muhammadiyah Nanggulan Kulon Progo yang didirikan pada tahun 1995. Pada tahun 2007 BPRB ditingkatkan statusnya menjadi RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan Kulon Progo.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan memiliki 72 tenaga kerja. Tenaga kerja medis berjumlah 41 orang dan non medis berjumlah 31 orang dengan kurang lebih 14 dokter yang mempunyai kewajiban membayar Pajak penghasilan. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan memiliki 44 pegawai tetap dan 14 pegawai kontrak. Rumah Sakit Umum PKU Muhamamdiyah Nanggulan sudah menjalankan kewajiban pembayaran pajak penghasilan seperti SPT masa PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Bagian administrasi akuntansi Rumah sakit sudah memiliki karyawan yang memang dikhususkan untuk mengelola bagian perpajakan. Sehingga diharapkan akan mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban terkait pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23.

Menurut Fathah & Khozin (2018), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pada tahun 2013 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan pernah terkena sanksi pajak akibat kesalahan di tahun 2010. Laporan yang diperiksa di kantor pajak ditemukan masih banyak terdapat kesalahan dalam hal salah hitung dan kurang bayar dikarenakan pihak Rumah Sakit belum mengetahui cara pelaporan yang benar. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Penerapan Pajak Peghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh pasal 23 Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan”. Peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam melaksanakan pemotongan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan PPh pasal 23 yang dilakukan pihak rumah sakit agar lebih teliti dalam melaksanakan kewajiban pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Mardhotillah dan Hafni (2021), pada pendekatan kualitatif permasalahan yang dikaji membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Objek penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dan perhitungan PPh pasal 21 dan

PPH pasal 23 tahun 2019-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi langsung tentang pelaksanaan pemenuhan kewajiban, sistem perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 dan PPh 23 yang dilakukan rumah sakit sakit dan juga terkait dengan penetapan penghasilan yang diperoleh pegawai seperti gaji, upah, tunjangan, dan penghasilan lainnya. Data sekunder berupa rekap laporan yang berhubungan dengan PPH pasal 21 pada tahun 2019-2022. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis kompratif dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan awalnya merupakan Balai pengobatan dan rumah bersalin yang akhirnya berubah menjadi rumah sakit pada tahun 2007. Jenis sumber daya manusia di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan terdiri dari dokter paruh waktu, karyawan tetap, karyawan kontrak. Karyawan yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak adalah Dokter. Dokter yang melaksanakan kewajiban pajak setiap bulannya mengalami naik turun dikarenakan tidak adanya dokter tetap di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan. Pelaksanaan pajak di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dikelola oleh tenaga kerja atau pegawai yang ahli dalam perpajakan hanya saja masih merangkap sebagai karyawan yang mengurus terkait pelaksanaan keuangan. Hal ini dikhawatirkan akan ada kesalahan yang bisa terjadi khususnya pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23.

Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan telah melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 21, PPh 25 badan dan juga PPh 23. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dalam pembayaran pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 rumah sakit telah melaksanakan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp15.210.042, kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp16.060.811, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp21.530.264 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp22.554.176.

Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan belum melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legal (Kurniawan & Dewi, 2019). Adanya penerapan perencanaan pajak di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dapat mengatur pembayaran pajak dan meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan Undang-Undang yang ada, dan dengan adanya penerapan pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang seharusnya dibayar.

Perhitungan pajak yang dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan beberapa belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini di lihat dari data yang diperoleh. Dasar pengenaan pajak yang digunakan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan menggunakan pengenaan pajak 50% dari jumlah penghasilan bruto. Perbedaan perhitungan pajak yang dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dengan peraturan perpajakan yang ada dapat dilihat pada Tabel 1-4.

Tabel 1 Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Dokter Tahun 2019

No	keterangan	PPH 21 yang di Setor Rumah Sakit		PPH 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan		Selisih
		Gaji Bruto	PPh 21	Gaji Bruto	PPh 21	

1	dr. A	Rp29.461.000	Rp736.525	Rp29.461.000	Rp736.525	Rp-
2	dr. B	Rp110.502.000	Rp2.762.550	Rp110.502.000	Rp3.287.650	-Rp525.100
3	dr. C	Rp26.167.500	Rp654.188	Rp26.167.500	Rp654.188	Rp-
4	dr. D	Rp5.620.000	Rp168.600	Rp5.620.000	Rp168.600	Rp-
5	dr. E	Rp9.503.000	Rp237.575	Rp9.503.000	Rp237.575	Rp-
6	dr. F	Rp44.879.500	Rp1.121.985	Rp44.879.500	Rp1.121.988	-Rp 3
7	dr. G	Rp7.201.000	Rp180.025	Rp7.201.000	Rp180.025	Rp-
8	dr. H	Rp35.238.000	Rp880.950	Rp35.238.000	Rp880.950	Rp-
9	dr. I	Rp49.057.000	Rp1.226.425	Rp49.057.000	Rp1.226.425	Rp-
10	dr. J	Rp92.239.000	Rp2.767.170	Rp92.239.000	Rp2.767.170	Rp-
11	dr. K	Rp17.852.000	Rp535.560	Rp17.852.000	Rp535.560	Rp-
12	dr. L	Rp23.645.000	Rp591.125	Rp23.645.000	Rp591.125	-Rp 1
13	dr. M	Rp63.373.500	Rp1.584.338	Rp63.373.500	Rp1.584.338	Rp-
14	dr. N	Rp28.318.000	Rp707.950	Rp28.318.000	Rp707.950	Rp-
15	dr. O	Rp12.616.000	Rp323.175	Rp12.616.000	Rp323.175	Rp-
16	dr. P	Rp37.481.000	Rp937.025	Rp37.481.000	Rp937.025	Rp-
17	dr. Q	Rp6.682.250	Rp200.465	Rp6.682.250	Rp200.468	-Rp 3
18	dr. S	Rp2.819.000	Rp70.475	Rp2.819.000	Rp70.475	Rp-
19	dr. T	Rp5.032.000	Rp125.800	Rp5.032.000	Rp125.800	Rp-

Sumber: Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023)

Tabel 2 Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Dokter Tahun 2020

No	keterangan	PPH 21 yang di Setor Rumah Sakit		PPH 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan		Selisih
		Gaji Bruto	PPH 21	Gaji Bruto	PPH 21	
1	dr. A	Rp24.678.000	Rp616.950	Rp24.678.000	Rp616.950	Rp-
2	dr. B	Rp136.303.500	Rp3.407.588	Rp136.303.500	Rp5.222.763	-Rp1.815.175
3	dr. C	Rp28.961.269	Rp724.030	Rp28.961.269	Rp724.032	-Rp 2
4	dr. D	Rp4.072.000	Rp122.160	Rp4.072.000	Rp122.160	Rp-
5	dr. E	Rp7.602.000	Rp190.050	Rp7.602.000	Rp190.050	Rp-
6	dr. F	Rp11.665.000	Rp291.625	Rp11.665.000	Rp291.625	-Rp 1
8	dr. H	Rp16.546.000	Rp413.650	Rp16.546.000	Rp413.650	Rp-
9	dr. I	Rp62.878.000	Rp1.571.950	Rp62.878.000	Rp1.571.950	Rp-
10	dr. J	Rp93.385.000	Rp2.801.550	Rp93.385.000	Rp2.801.550	Rp-
11	dr. K	Rp16.478.000	Rp494.340	Rp16.478.000	Rp494.340	Rp-
12	dr. L	Rp31.001.500	Rp775.036	Rp31.001.500	Rp775.038	-Rp 2
13	dr. M	Rp58.372.500	Rp1.459.312	Rp58.372.500	Rp1.459.313	-Rp 1
14	dr. N	Rp33.124.000	Rp828.100	Rp33.124.000	Rp828.100	Rp-
15	dr. O	Rp3.234.748	Rp80.869	Rp3.234.748	Rp80.869	Rp-
16	dr. P	Rp8.454.000	Rp211.350	Rp8.454.000	Rp211.350	Rp-
17	dr. Q	Rp22.700.000	Rp681.001	Rp22.700.000	Rp681.000	Rp 1
18	dr. S	Rp1.173.000	Rp29.325	Rp1.173.000	Rp29.325	Rp-
19	dr. T	Rp7.578.000	Rp189.450	Rp7.578.000	Rp189.450	Rp-
20	dr. U	Rp3.076.000	Rp76.900	Rp3.076.000	Rp76.900	Rp-
21	dr. V	Rp15.740.000	Rp393.500	Rp15.740.000	Rp393.500	Rp-
22	dr. W	Rp17.952.500	Rp538.575	Rp17.952.500	Rp538.575	Rp-
23	dr. X	Rp3.170.000	Rp79.250	Rp3.170.000	Rp79.250	Rp-
24	dr. Y	Rp2.572.000	Rp64.300	Rp2.572.000	Rp64.300	Rp-
25	dr. Z	Rp470.000	Rp14.100	Rp470.000	Rp14.100	Rp-
26	dr. Al	Rp195.000	Rp5.850	Rp195.000	Rp5.850	Rp-

Sumber: Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023)

Tabel 3 Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Dokter Tahun 2021

No	keterangan	PPh 21 yang di Setor Rumah Sakit		PPh 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan		Selisih
		Gaji Bruto	PPh 21	Gaji Bruto	PPh 21	
1	dr. A	Rp45.545.000	Rp1.138.625	Rp45.545.000	Rp1.138.625	Rp-
2	dr. B	Rp123.763.000	Rp3.094.074	Rp123.763.000	Rp4.282.225	-Rp1.188.151
3	dr. C	Rp43.249.290	Rp1.081.233	Rp43.249.290	Rp1.081.232	-Rp 1
4	dr. D	Rp5.260.000	Rp157.800	Rp5.260.000	Rp157.800	Rp-
5	dr. E	Rp1.645.000	Rp41.125	Rp1.645.000	Rp41.125	Rp-
6	dr. H	Rp1.085.000	Rp27.125	Rp1.085.000	Rp27.125	Rp-
7	dr. I	Rp64.085.000	Rp1.602.125	Rp64.085.000	Rp1.602.125	Rp-
8	dr. J	Rp122.850.000	Rp3.685.500	Rp122.850.000	Rp5.056.500	-Rp1.371.000
9	dr. K	Rp7.310.000	Rp219.300	Rp7.310.000	Rp219.300	Rp-
10	dr. L	Rp29.374.500	Rp734.361	Rp29.374.500	Rp734.363	-Rp 2
11	dr. M	Rp44.412.500	Rp1.110.312	Rp44.412.500	Rp1.110.313	-Rp 1
12	dr. N	Rp45.175.000	Rp1.129.375	Rp45.175.000	Rp1.129.375	Rp-
13	dr. O	Rp2.114.000	Rp56.850	Rp2.114.000	Rp56.850	Rp-
14	drg. Q	Rp31.238.501	Rp841.070	Rp31.238.501	Rp841.070	Rp-
15	dr. V	Rp52.725.000	Rp1.318.125	Rp52.725.000	Rp1.318.125	Rp-
16	dr. W	Rp60.925.288	Rp1.827.759	Rp60.925.288	Rp1.827.759	Rp-
17	dr. X	Rp36.660.000	Rp916.500	Rp36.660.000	Rp916.500	Rp-
18	dr. Y	Rp39.742.000	Rp993.550	Rp39.742.000	Rp993.550	Rp-
19	dr. Ab	Rp35.915.000	Rp897.875	Rp35.915.000	Rp897.875	Rp-
20	dr. Ac	Rp26.303.159	Rp657.578	Rp26.303.159	Rp657.579	-Rp 1

Sumber: Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023)

Tabel 4 Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Dokter Tahun 2022

No	Keterangan	PPh 21 yang di Setor Rumah Sakit		PPh 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan		Selisih
		Gaji Bruto	PPh 21	Gaji Bruto	PPh 21	
1	dr. A	Rp43.550.000	Rp1.088.750	Rp43.550.000	Rp1.088.750	Rp-
2	dr. B	Rp121.676.100	Rp3.041.902	Rp121.676.100	Rp3.125.707	-Rp 83.805
3	dr. C	Rp38.787.336	Rp969.683	Rp38.787.336	Rp969.683	Rp-
4	dr. D	Rp3.990.000	Rp119.700	Rp3.990.000	Rp119.700	Rp-
5	dr. I	Rp64.695.000	Rp1.617.375	Rp64.695.000	Rp1.617.375	Rp-
6	dr. J	Rp107.380.000	Rp3.221.400	Rp107.380.000	Rp3.221.400	Rp-
7	dr. L	Rp44.910.000	Rp1.122.750	Rp44.910.000	Rp1.122.750	-Rp 1
8	dr. M	Rp57.848.000	Rp1.446.199	Rp57.848.000	Rp1.446.200	-Rp 1
9	dr. N	Rp4.305.000	Rp107.625	Rp4.305.000	Rp107.625	Rp-
10	dr. O	Rp39.252.817	Rp981.320	Rp39.252.817	Rp981.320	-Rp 1
11	drg. Q	Rp32.337.880	Rp808.446	Rp32.337.880	Rp808.447	-Rp 1
12	dr. S	Rp34.586.000	Rp864.650	Rp34.586.000	Rp864.650	Rp-
13	dr. V	Rp14.255.000	Rp356.375	Rp14.255.000	Rp356.375	Rp-
14	dr. X	Rp3.775.000	Rp94.375	Rp3.775.000	Rp94.375	Rp-
15	dr. Y	Rp74.069.500	Rp1.851.737	Rp74.069.500	Rp1.851.738	-Rp 1
16	dr. Ab	Rp4.220.000	Rp105.500	Rp4.220.000	Rp105.500	Rp-
17	dr. Ac	Rp38.356.400	Rp958.910	Rp38.356.400	Rp958.910	Rp-
18	dr. Ad	Rp40.700.000	Rp1.017.500	Rp40.700.000	Rp1.017.500	Rp-
19	dr. Ae	Rp11.120.000	Rp278.000	Rp11.120.000	Rp278.000	Rp-
20	dr. Af	Rp39.865.000	Rp996.625	Rp39.865.000	Rp996.625	Rp-
21	dr. Ag	Rp76.641.492	Rp1.916.036	Rp76.641.492	Rp1.916.037	-Rp 1
22	dr. Ah	Rp35.573.000	Rp889.325	Rp35.573.000	Rp889.325	Rp-

23	dr. Ai	Rp32.265.000	Rp807.750	Rp32.265.000	Rp807.750	Rp-
24	dr. Aj	Rp1.392.500	Rp34.812	Rp1.392.500	Rp34.813	-Rp 1
25	dr. Ak	Rp7.657.000	Rp191.424	Rp7.657.000	Rp191.425	-Rp 1
26	dr. Al	Rp2.215.500	Rp55.388	Rp2.215.500	Rp55.388	Rp-

Sumber: Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023)

Perhitungan di atas adalah terdapat selisish antara perhitungan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dengan perhitungan yang dilakukan penulis yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Terdapat perbedaan jumlah pemotongan pajak pada 2 dokter. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan tidak menerapkan perhitungan kumulatif dalam penentuan jumlah pemotongan pajak. Tarif pajak seharusnya akan naik seiring dengan besarnya jumlah penghasilan yang didapat dan sudah diakumulasikan setiap bulannya.

Penghasilan 0 sampai Rp 50.000.000 dikenakan tarif 5%, penghasilan kena pajak kumulatif Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000 dikenakan tarif 15%, penghasilan sebesar Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan tarif 25%, penghasilan kena pajak kumulatif di atas Rp 500.000.000. Pada tahun 2020 lapisan tarif pajak mengalami perubahan menjadi Penghasilan 0 sampai Rp 60.000.000 dikenakan tarif 5%, penghasilan kena pajak kumulatif Rp 60.000.000 sampai Rp 250.000.000 dikenakan tarif 15%, penghasilan sebesar Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan tarif 25%, penghasilan kena pajak kumulatif sebesar Rp 500.000.000 sampai Rp 5.000.000.000, penghasilan kena pajak kumulatif di atas Rp 5.000.000.000. Hal ini akan berdampak pada penyusunan SPT di akhir tahun pajak. Penyesuaian pajak ini akan menjadi tanggungjawab wajib pajak.

Penyetoran Pajak Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan telah dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Perbandingan tanggal penyetoran SPT Masa PPh 21 oleh Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dan tanggal penyetoran sesuai aturan dapat dilihat pada Tabel 5-8.

Tabel 5 Penyetoran Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2019

SPT MASA	Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan	Tanggal Penyetoran Rumah Sakit	Analisa
Januari	10 Februari 2019	09 Februari 2019	Tepat Waktu
Februari	10 Maret 2019	08 Maret 2019	Tepat Waktu
Maret	10 April 2019	06 April 2019	Tepat Waktu
April	10 Mei 2019	10 Mei 2019	Tepat Waktu
Mei	10 Juni 2019	10 Juni 2019	Tepat Waktu
Juni	10 Juli 2019	09 Juli 2019	Tepat Waktu
Juli	10 Agustus 2019	08 Agustus 2019	Tepat Waktu
Agustus	10 September 2019	09 September 2019	Tepat Waktu
September	10 Oktober 2019	09 Oktober 2019	Tepat Waktu
Oktober	10 November 2019	07 November 2019	Tepat Waktu
November	10 Desember 2019	10 Desember 2019	Tepat Waktu
Desember	10 Januari 2020	10 Januari 2020	Tepat Waktu

Sumber: RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2022)

Tabel 6 Penyetoran Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2020

SPT MASA	Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan	Tanggal Penyetoran Rumah Sakit	Analisa
Januari	10 Februari 2019	09 Februari 2019	Tepat Waktu
Februari	10 Maret 2019	08 Maret 2019	Tepat Waktu
Maret	10 April 2019	06 April 2019	Tepat Waktu
April	10 Mei 2019	10 Mei 2019	Tepat Waktu
Mei	10 Juni 2019	10 Juni 2019	Tepat Waktu
Juni	10 Juli 2019	09 Juli 2019	Tepat Waktu
Juli	10 Agustus 2019	08 Agustus 2019	Tepat Waktu
Agustus	10 September 2019	09 September 2019	Tepat Waktu
September	10 Oktober 2019	09 Oktober 2019	Tepat Waktu
Oktober	10 November 2019	07 November 2019	Tepat Waktu
November	10 Desember 2019	10 Desember 2019	Tepat Waktu
Desember	10 Januari 2020	10 Januari 2020	Tepat Waktu

Sumber: RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2022)

Tabel 7 Penyetoran Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2021

SPT MASA	Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan	Tanggal Penyetoran Rumah Sakit	Analisa
Januari	10 Februari 2021	08 Februari 2021	Tepat Waktu
Februari	10 Maret 2021	09 Maret 2021	Tepat Waktu
Maret	10 April 2021	09 April 2021	Tepat Waktu
April	10 Mei 2021	10 Mei 2021	Tepat Waktu
Mei	10 Juni 2021	09 Juni 2021	Tepat Waktu
Juni	10 Juli 2021	06 Juli 2021	Tepat Waktu
Juli	10 Agustus 2021	10 Agustus 2021	Tepat Waktu
Agustus	10 September 2021	09 September 2021	Tepat Waktu
September	10 Oktober 2021	08 Oktober 2021	Tepat Waktu
Oktober	10 November 2021	10 November 2021	Tepat Waktu
November	10 Desember 2021	10 Desember 2021	Tepat Waktu
Desember	10 Januari 2022	10 Januari 2022	Tepat Waktu

Sumber: RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2022)

Tabel 8 Penyetoran Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2022

SPT MASA	Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan	Tanggal Penyetoran Rumah Sakit	Analisa
Januari	10 Februari 2022	10 Februari 2022	Tepat Waktu
Februari	10 Maret 2022	10 Maret 2022	Tepat Waktu
Maret	10 April 2022	08 April 2022	Tepat Waktu
April	10 Mei 2022	10 Mei 2022	Tepat Waktu
Mei	10 Juni 2022	09 Juni 2022	Tepat Waktu
Juni	10 Juli 2022	12 Juli 2022	Terlambat Bayar
Juli	10 Agustus 2022	10 Agustus 2022	Tepat Waktu
Agustus	10 September 2022	10 September 2022	Tepat Waktu
September	10 Oktober 2022	10 Oktober 2022	Tepat Waktu
Oktober	10 November 2022	10 November 2022	Tepat Waktu

November	10 Desember 2022	12 Desember 2022	Terlambat Bayar
Desember	10 Januari 2023	9 Januari 2023	Tepat Waktu

Sumber: RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023)

Berdasarkan data yang sudah diperoleh dapat di tarik kesimpulan terkait penyetoran pajak dari tahun 2019 sampai 2022 yaitu, Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan sudah melaksanakan penyetoran pajak dengan tepat waktu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menghindarkan wajib pajak dari adanya sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak

Pelaporan Pajak Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dapat dilihat pada tabel 9-12. Tabel tersebut menampilkan perbandingan tanggal penyetoran SPT Masa PPh 21 yang telah dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.

Tabel 9 Pelaporan Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2019

SPT MASA	Tanggal Pelaporan Sesuai Aturan	Tanggal Pelaporan Rumah Sakit	Analisa
Januari	20 Februari 2019	20 Februari 2019	Tepat Waktu
Februari	20 Maret 2019	20 Maret 2019	Tepat Waktu
Maret	20 April 2019	11 April 2019	Tepat Waktu
April	20 Mei 2019	18 Mei 2019	Tepat Waktu
Mei	20 Juni 2019	19 Juni 2019	Tepat Waktu
Juni	20 Juli 2019	20 Juli 2019	Tepat Waktu
Juli	20 Agustus 2019	20 Agustus 2019	Tepat Waktu
Agustus	20 September 2019	18 September 2019	Tepat Waktu
September	20 Oktober 2019	12 Oktober 2019	Tepat Waktu
Oktober	20 November 2019	18 November 2019	Tepat Waktu
November	20 Desember 2019	20 Desember 2019	Tepat Waktu
Desember	20 Januari 2020	20 Januari 2020	Tepat Waktu

Sumber: RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2022)

Tabel 10 Pelaporan Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2020

SPT MASA	Tanggal Pelaporan Sesuai Aturan	Tanggal Pelaporan Rumah Sakit	Analisa
Januari	20 Februari 2020	14 Februari 2020	Tepat Waktu
Februari	20 Maret 2020	19 Maret 2020	Tepat Waktu
Maret	20 April 2020	10 April 2020	Tepat Waktu
April	20 Mei 2020	18 Mei 2020	Tepat Waktu
Mei	20 Juni 2020	19 Juni 2020	Tepat Waktu
Juni	20 Juli 2020	16 Juli 2020	Tepat Waktu
Juli	20 Agustus 2020	20 Agustus 2020	Tepat Waktu
Agustus	20 September 2020	20 September 2020	Tepat Waktu
September	20 Oktober 2020	16 Oktober 2020	Tepat Waktu
Oktober	20 November 2020	20 November 2020	Tepat Waktu
November	20 Desember 2020	18 Desember 2020	Tepat Waktu
Desember	20 Januari 2021	20 Januari 2021	Tepat Waktu

Sumber: RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2022)

Tabel 11 Pelaporan Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah

Nanggulan Tahun 2021

SPT MASA	Tanggal Pelaporan Sesuai Aturan	Tanggal Pelaporan Rumah Sakit	Analisa
Januari	20 Februari 2021	14 Februari 2021	Tepat Waktu
Februari	20 Maret 2021	18 Maret 2021	Tepat Waktu
Maret	20 April 2021	15 April 2021	Tepat Waktu
April	20 Mei 2021	20 Mei 2021	Tepat Waktu
Mei	20 Juni 2021	18 Juni 2021	Tepat Waktu
Juni	20 Juli 2021	19 Juli 2021	Tepat Waktu
Juli	20 Agustus 2021	19 Agustus 2021	Tepat Waktu
Agustus	20 September 2021	15 September 2021	Tepat Waktu
September	20 Oktober 2021	19 Oktober 2021	Tepat Waktu
Oktober	20 November 2021	20 November 2021	Tepat Waktu
November	20 Desember 2021	17 Desember 2021	Tepat Waktu
Desember	20 Januari 2022	01 Januari 2022	Tepat Waktu

Sumber: RSUD Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2022)

Tabel 12 Pelaporan Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2022

SPT MASA	Tanggal Pelaporan Sesuai Aturan	Tanggal Pelaporan Rumah Sakit	Analisa
Januari	20 Februari 2022	18 Februari 2022	Tepat Waktu
Februari	20 Maret 2022	18 Maret 2022	Tepat Waktu
Maret	20 April 2022	17 April 2022	Tepat Waktu
April	20 Mei 2022	18 Mei 2022	Tepat Waktu
Mei	20 Juni 2022	18 Juni 2022	Tepat Waktu
Juni	20 Juli 2022	16 Juli 2022	Tepat Waktu
Juli	20 Agustus 2022	20 Agustus 2022	Tepat Waktu
Agustus	20 September 2022	18 September 2022	Tepat Waktu
September	20 Oktober 2022	17 Oktober 2022	Tepat Waktu
Oktober	20 November 2022	19 November 2022	Tepat Waktu
November	20 Desember 2022	17 Desember 2022	Tepat Waktu
Desember	20 Januari 2023	20 Desember 2022	Tepat Waktu

Sumber: RSUD Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023)

Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan beberapa sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini di lihat dari data yang diperoleh. Perbedaan perhitungan pajak yang dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah nanggulan dengan peraturan perpajakan yang ada dapat dilihat pada Tabel 13 di bawah ini :

Tabel 13 Perhitungan PPh 23 Atas Sewa Alat Tahun 2022

SPT MASA	PPh 23 yang di Setor Rumah Sakit		PPh 23 Menurut Undang-Undang Perpajakan		Selisih
	Penghasilan Bruto	PPh 23	Penghasilan Bruto	PPh 23	
Maret	Rp 7.860.000	Rp 157.200	Rp 7.860.000	Rp 157.200	Rp -
April	Rp 5.340.000	Rp 106.800	Rp 5.340.000	Rp 106.800	Rp -
Mei	Rp 310.000	Rp 6.500	Rp 310.000	Rp 6.200	Rp 300
Juni	Rp 10.460.000	Rp 209.200	Rp 10.460.000	Rp 209.200	Rp -
Juli	Rp 10.280.000	Rp 205.600	Rp 10.280.000	Rp 205.600	Rp -
Agustus	Rp 280.000	Rp 5.600	Rp 280.000	Rp 5.600	Rp -

September	Rp 5.600.000	Rp 112.000	Rp 5.600.000	Rp 112.000	Rp -
Oktober	Rp 12.700.000	Rp 254.000	Rp 12.700.000	Rp 254.000	Rp -
November	Rp 5.320.000	Rp 106.400	Rp 5.320.000	Rp 106.400	Rp -
Desember	Rp 7.680.000	Rp 153.600	Rp 7.680.000	Rp 153.600	Rp -

Sumber: RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak PPh 23 pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan sudah Sesuai dengan Undang-Undang namun masih ada selisih di SPT Masa pajak Mei. Hal ini terjadi karena adanya pembulatan saat penyeteroran pajak. Penyeteroran Pajak PPh 23 yang telah dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dan perbandingannya dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Penyeteroran Masa SPT PPh 23 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2022

SPT MASA	Tanggal Penyeteroran Sesuai Aturan	Tanggal Penyeteroran Rumah Sakit	Analisa
Maret	10 April 2022	08 April 2022	Tepat Waktu
April	10 Mei 2022	10 Mei 2022	Tepat Waktu
Mei	10 Juni 2022	11 Juni 2022	Terlambat Bayar
Juni	10 Juli 2022	08 Juli 2022	Tepat Waktu
Juli	10 Agustus 2022	13 Agustus 2022	Terlambat Bayar
Agustus	10 September 2022	10 September 2022	Tepat Waktu
September	10 Oktober 2022	10 Oktober 2022	Tepat Waktu
Oktober	10 November 2022	15 November 2022	Terlambat Bayar
November	10 Desember 2022	16 Desember 2022	Terlambat Bayar
Desember	10 Januari 2023	09 Januari 2023	Tepat Waktu

Sumber: RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023)

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2022 dari bulan Maret hingga Desember, terjadi keterlambatan pada SPT Masa pajak bulan Mei, Juli, Oktober dan November. Setelah adanya penelitian, terdapat kewajiban kontijensi seperti sanksi bunga dan denda yang harus dibayarkan oleh Rumah Sakiy Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan akibat adanya keterlambatan penyeteroran PPh 23. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan seharusnya dikenakan sanksi 2% setiap bulan yang tidak tepat waktu dalam penyeterorannya. Pelaporan Pajak PPh 23 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dengan dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15 Pelaporan Masa SPT PPh 23 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2022

SPT MASA	Tanggal Pelaporan Sesuai Aturan	Tanggal Pelaporan Rumah Sakit	Analisa
Maret	20 April 2022	20 April 2022	Tepat Waktu
April	20 Mei 2022	19 Mei 2022	Tepat Waktu
Mei	20 Juni 2022	17 Juni 2022	Tepat Waktu
Juni	20 Juli 2022	16 Juli 2022	Tepat Waktu
Juli	20 Agustus 2022	13 Agustus 2022	Tepat Waktu
Agustus	20 September 2022	15 September 2022	Tepat Waktu
September	20 Oktober 2022	14 Oktober 2022	Tepat Waktu
Oktober	20 November 2022	18 November 2022	Tepat Waktu
November	20 Desember 2022	17 Desember 2022	Tepat Waktu
Desember	20 Januari 2023	17 Januari 2023	Tepat Waktu

Sumber: RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan telah melaksanakan pelaporan SPT masa pajak PPh 23 dari bulan Maret sampai dengan Desember 2022 dengan tepat waktu atau dilakukan sebelum batas waktu pelaporan yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis data di atas adalah bahwa selama tahun 2019 sampai dengan 2022 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dalam melaksanakan kewajiban atas pajak PPh 21 dan PPh 23 dilakukan dengan cukup baik, meskipun masih ada kesalahan dalam beberapa hal.
2. Pelaporan pajak PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan selama 2019 sampai dengan 2022 sudah melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan atau Undang-Undang yang berlaku. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan melakukan penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 21 sebelum batas waktu yang ditetapkan. Hal ini dilakukan guna menghindarkan wajib pajak dari adanya sanksi denda. Ketika terjadi kurang bayar seluruhnya akan menjadi urusan dan tanggungjawab dari masing-masing dokter dan bukan tanggung jawab rumah sakit. Penyetoran pajak PPh 23 di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan terjadi keterlambatan. Pelaporan pajak PPh 23 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan selama 2022 sudah melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan atau Undang-Undang yang berlaku.
3. Berdasarkan perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan masih belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan belum menerapkan sistem penghasilan kena pajak kumulatif dalam perhitungannya, sehingga terjadi perbedaan antara perhitungan rumah sakit dengan perhitungan yang dilakukan peneliti berdasarkan Undang-Undang perpajakan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang dimiliki Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan terkait penyetoran dan pelaporan PPh 21 dan PPh 23 belum lengkap sehingga peneliti cukup terhambat. Terbatasnya waktu wawancara dengan informan dikarenakan beliau sedang sibuk dengan pekerjaan yang ada di Rumah Sakit. Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan kepada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan yaitu sebaiknya rumah sakit melakukan *update* terkait kebijakan perpajakan sehingga nantinya tidak terjadi lagi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan juga disarankan melakukan perencanaan pajak sehingga dapat membantu rumah sakit untuk menekan jumlah pajak dengan memanfaatkan peraturan yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Anggreni, N. made tika, & Noviari, N. (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit XYZ. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9 (1), 39-58.

- Fathah, Rigel Nurul. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3 (1), 198-208.
- Fathah, Rigel Nurul & Khozin, M. (2018). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)*, 7(2), 32-37.
- Kawindah, A. P. A., Nangoi, G., & Bidiarso, N. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Tenaga Honorar Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna. *Jurnal EMBA*, 9 (4), 865-872.
- Mardhotillah, Uni & Hafni, Diska Arliena. (2021). Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan Obat-Obatan Penanggulangan Covid-19 Di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 11 (2), 185-194.
- Maulana, Sofia Arifin Nur & Hafni, Diska Arliena. (2021). Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat-Obatan Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman-DI Yogyakarta. *LIQUIDITY: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 10 (2), 174-185.
- Ningsih, Nila Nurma & Hafni, Diska Arliena. (2021). Analisis Pelaksanaan Kewajiban atas Pajak Penghasilan 21 Pada Rumah Sakit X di Klaten-Jawa Tengah. *Review of Applied Accounting Research*, 1 (2), 1-10.
- Prihatono, Y. P., & Sutomo, H. (2019a). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada RS Vania Bogor Tahun 2015—2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 331–342.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (Sebelas). Jakarta: Salemba Empat.
- Rondonuwu, C. W., Elim, I., & Pinatik, S. (2017). Analisa Penerapan perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(01), 48-53.
- Sulisyaningsih, Sulistyaningsih., Cahyani, Finaningsih Endang., Zulala, Nuli Nuryanti & Lestari, Sri. (2020). Persepsi Pasien tentang Kualitas Layanan Mempengaruhi Kepuasan Pasien Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit. *Disease Prevention and Public Health Journal*, 14 (1), 37-45.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.